

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN LOA JANAN



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA JANAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun suatu Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Loa Janan Tahun 2022

Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Loa Janan Tahun 2022, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Loa Janan perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi Kecamatan Loa Janan “ **Menjadi Institusi Pelaksana Teknis Kewilayahan yang Berintegritas, Efektif dan Efisien** “

Penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Loa Janan ini berpedoman kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.

Camat Loa Janan



Muhaji, S. Sos, M. Si.

NIP. 19690510 199401 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
 BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH RAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020.....	4
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	17
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Program dan Kegiatan.....	23
 BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) pasal (2) dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/Kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP daerah, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat daerah, yang di susun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah sebagaimana di maksud dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategyp* pembangunan yang dikenal dengan nama GERBANG RAJA JILID II (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Periode tahun 2022-2026 serta keberhasilan (success story) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya

Di dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026, sesuai strategi dan arah kebijakan dimunculkan konsep **Membangun Kabupaten dari Kecamatan** yakni satu pendekatan baru yang merupakan terobosan dan juga pengejawantahan dari kebijakan pemerintah tentang bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Secara garis besar konsep yang akan didorong di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis pemerataan kewilayahan dan juga penguatan peran masing stakeholder yang ada

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Loa Janan selama tahun 2022 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan.

Pada dasarnya rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Loa Janan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penulisan Renja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH RAHUN 2022

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Gerbang Raja Jilid II yaitu “KUTAI KARTANEGARA MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakankebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Loa Janan telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Menyusun dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- b. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, pelaksanaan kinerja Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TW II TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	APBD 2022					
	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI SAMPAI BULAN JULI	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3		4	4	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			6.618.890.261,00	3.191.194.350,00	3.427.695.911,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			140.030.000,00	79.020.000,00	61.010.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000.000,00	16.370.000,00	8.630.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	115.030.000,00	62.650.000,00	52.380.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			5.355.086.785,00	2.616.936.332,00	2.738.150.453,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	5.280.226.785,00	2.576.736.332,00	2.703.490.453,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan keuangan	1	Dokumen	74.860.000,00	40.200.000,00	34.660.000,00
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan			32.200.000,00	25.900.000,00	6.300.000,00
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah dari SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1	Laporan	32.200.000,00	25.900.000,00	6.300.000,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian			-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN	20	Orang	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah			232.789.050,00	102.661.000,00	130.128.050,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	7	Jenis	7.997.700,00	-	7.997.700,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	70	Jenis	40.000.000,00	34.563.000,00	5.437.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Peralatan Kebersihan disediakan	30	Jenis	38.060.000,00	11.800.000,00	26.260.000,00
	Jumlah Bahan Logistik Kantor Makan Minum disediakan	1000	Porsi			-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	Jenis	10.871.350,00	1.548.000,00	9.323.350,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50	Pelaksana	85.860.000,00	54.750.000,00	31.110.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	1	Sistem	50.000.000,00	-	50.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	1	Unit	-	-	-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			480.488.556,00	201.794.606,00	278.693.950,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228	Rekening	128.843.220,00	38.700.942,00	90.142.278,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jenis	10.350.000,00	6.250.000,00	4.100.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Non ASN	288	OB	341.295.336,00	156.843.664,00	184.451.672,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			378.295.870,00	164.882.412,00	213.413.458,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	3	Unit	228.495.000,00	164.882.412,00	63.612.588,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit	1	Unit	149.800.870,00	-	149.800.870,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			10.990.000.000,00	953.535.760,00	10.036.464.240,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			-	-	-
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa	8	Desa	-	-	-

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			100.000.000,00	74.110.000,00	25.890.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa	8	Desa	100.000.000,00	74.110.000,00	25.890.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			10.890.000.000,00	879.425.760,00	10.010.574.240,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin /Surat keterangan yang diterbitkan	1000	Berkas	15.000.000,00	6.060.000,00	8.940.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Unit	1	Paket	10.875.000.000,00	873.365.760,00	10.001.634.240,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			407.225.844,00	76.655.000,00	330.570.844,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan			407.225.844,00	76.655.000,00	330.570.844,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang	200	Peserta	56.555.000,00	56.555.000,00	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Peserta MTQ	125	Peserta	350.670.844,00	20.100.000,00	330.570.844,00
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3	Lembaga			
	Jumlah Event	1	Event			
	Jumlah Lomba Desa	8	Desa			
	Jumlah Peserta Pemberdayaan PKK	25	Orang			

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
JUMLAH				18.016.116.105,00	4.221.385.110,00	13.794.730.995,00

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Loa Janan Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Loa Janan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari Masyarakat:

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2021 DAN 2022

USULAN	ALAMAT
Pembuatan Drainase Jalan Padat Karya RT. 19, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan	RT. 19, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan
Pengadaan Pompa Portable Untuk Relawan Lopena, Desa Loajan Ulu, Kecamatan Loa Janan	Desa Loajan Ulu, Kecamatan Loa Janan
Peningkatan Badan Jl. Garuda Gg. Sabrina RT. 36, Desa Loajan Ulu, Kecamatan Loa Janan	RT. 36, Desa Loajan Ulu, Kecamatan Loa Janan
Penurapan Jalan Di Gang Surya RT. 26, Desa Loajan Ulu, Kecamatan Loa Janan	RT. 26, Desa Loajan Ulu, Kecamatan Loa Janan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	RT 07 Desa Tani Bhakti, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Bhakti
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	RT 11 Desa tani Bhakti, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Gang Mentari 7 Desa Loa Duri Ilir RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir
Peningkatan/Pemeliharaan Saluran Drainase Kecamatan Loa Janan	Dusun Manunggal Jaya RT. 10 dan Rt. 12 Desa Tani Bhakti, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Bhakti
Peningkatan/Pemeliharaan Saluran Drainase Kecamatan Loa Janan	Parit RT. 3 Desa Loa Duri Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir
Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Loa Janan	Jalan Swadaya RT. 17 RT. 20 Jahuq, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya

Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Loa Janan	Dusun Sari Mulya B, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya
Pembangunan Turap Kecamatan Loa Janan	Gang Persatuan Dalam RT. 18 Dusun I, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu
Pembangunan Turap Kecamatan Loa Janan	Jalan pembangunan Rt. 01 Dusun Mekar Jaya, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya
Pembangunan Turap Kecamatan Loa Janan	Jalan Teratai 2 RT.5, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu
Pembangunan Turap Kecamatan Loa Janan	Jalan Teratai RT.6, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Dusun Mario Rt. 33, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Dusun Mario Rt. 34, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Dusun Mario Rt. 35, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Usaha Tani RT.45, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Padat Karya RT. 10, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Pelita s/d Jalan Putak Jaya, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Kemuning, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Tunas Pandang, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Kutai Baru RT.16, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Surya RT.14, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Gang Samapai HATI RT.1, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Bhakti
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Desa Tani Bhakti RT. 09, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Bhakti
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	Jalan Dusun Batu Hitam, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu
Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Loa Janan	jalan gantung rt. 10/3, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Duri Ulu
Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Loa Janan	dusun putak, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir
Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Loa Janan	dusun bangun sari rt. 07, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	jalan poros masaping rt.11 ke rt.12, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Loa Janan	jalan garuda gg. sabrina dusun gunung pegat. rt. 36, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu
Lanjutan Semenisasi Jalan KM 25 Dalam	RT. 14 dan 15 Desa Batuah Kec. Loa Janan
Lanjutan Semenisasi Jalan Makam	RT. 05 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan
Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Loa Janan	rt. 04, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah
Pembangunan Turap Lapangan Sepak Bola Batuah	Desa Batuah Kec. Loa Janan
Pembuatan Gorong Gorong	RT. 06 Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan
Pembuatan Parit / Drainase	RT. 03 Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan
Pembuatan Parit / Drainase	Jl. Adonara Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan
Pembuatan Turap Gang Surya	RT. 26 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan
Pengerasan Jalan	RT. 03 Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 – 2026. Pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Loa Janan Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	RENJA/RKPD			APBD 2022			USULAN PERUBAHAN RENJA 2022			SELISIH ANATAR PAGU APBD 2022 DENGAN USULAN PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGI INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGI INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGI INDIKATIF		
1	2	3	4	2	3	4	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		6.618.890.261,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		6.618.890.261,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		6.762.010.261,00	143.120.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		140.030.000,00	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		140.030.000,00	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		140.030.000,00	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	115.030.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	115.030.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	115.030.000,00	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		5.355.086.785,00	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		5.355.086.785,00	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		5.367.206.785,00	12.120.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	5.280.226.785,00	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	5.280.226.785,00	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	5.280.226.785,00	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan keuangan	1 Dokumen	74.860.000,00	Jumlah Laporan keuangan	1 Dokumen	74.860.000,00	Jumlah Laporan keuangan	1 Dokumen	86.980.000,00	12.120.000,00	Kekurangan Honor Pembuat daftar Gaji
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		32.200.000,00	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		32.200.000,00	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		47.200.000,00	15.000.000,00	
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah dari SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Laporan	32.200.000,00	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Laporan	32.200.000,00	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Laporan	47.200.000,00	15.000.000,00	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian			-	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian			-	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian			-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN	20	Orang	-	Jumlah ASN	20	Orang	-	Jumlah ASN	20	Orang	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah			232.789.050,00	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah			232.789.050,00	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah			338.789.050,00	106.000.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	7	Jenis	7.997.700,00	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	7	Jenis	7.997.700,00	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	7	Jenis	7.997.700,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	70	Jenis	40.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	70	Jenis	40.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	70	Jenis	65.000.000,00	25.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Peralatan Kebersihan disediakan	30	Jenis	38.060.000,00	Jumlah Bahan Logistik Kantor Peralatan Kebersihan disediakan	30	Jenis	38.060.000,00	Jumlah Bahan Logistik Kantor Peralatan Kebersihan disediakan	30	Jenis	59.060.000,00	21.000.000,00	
	Jumlah Bahan Logistik Kantor Makan Minum disediakan	1000	Porsi		Jumlah Bahan Logistik Kantor Makan Minum disediakan	1000	Porsi		Jumlah Bahan Logistik Kantor Makan Minum disediakan	1000	Porsi		-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	Jenis	10.871.350,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	Jenis	10.871.350,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	Jenis	10.871.350,00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50	Pelaksana	85.860.000,00	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50	Pelaksana	85.860.000,00	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50	Pelaksana	145.860.000,00	60.000.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	1	Sistem	50.000.000,00	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	1	Sistem	50.000.000,00	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	1	Sistem	50.000.000,00	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	1	Unit	-	Jumlah Unit	1	Unit	-	Jumlah Unit	1	Unit	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			480.488.556,00	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			480.488.556,00	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			490.488.556,00	10.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228	Rekening	128.843.220,00	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228	Rekening	128.843.220,00	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228	Rekening	138.843.220,00	10.000.000,00	Kekurangan Pagu Anggaran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jenis	10.350.000,00	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jenis	10.350.000,00	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jenis	10.350.000,00	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Non ASN	288	OB	341.295.336,00	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Non ASN	288	OB	341.295.336,00	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Non ASN	288	OB	341.295.336,00	-	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			378.295.870,00	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			378.295.870,00	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			378.295.870,00	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	3	Unit	228.495.000,00	Jumlah unit	3	Unit	228.495.000,00	Jumlah unit	3	Unit	228.495.000,00	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit	1	Unit	149.800.870,00	Jumlah unit	1	Unit	149.800.870,00	Jumlah unit	1	Unit	149.800.870,00	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			10.990.000.000,00	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			10.990.000.000,00	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			12.260.000.000,00	1.270.000.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			-	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			-	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			-	-	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa	8	Desa	-	Jumlah Desa	8	Desa	-	Jumlah Desa	8	Desa	-	-	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			100.000.000,00	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			100.000.000,00	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			180.379.500,00	80.379.500,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa	8	Desa	100.000.000,00	Jumlah Desa	8	Desa	100.000.000,00	Jumlah Desa	8	Desa	180.379.500,00	80.379.500,00	Penambahan pagu dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												20.000.000,00	20.000.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									Jumlah Dokumen	1	Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												-	-	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			-	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			10.890.000.000,00	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			10.890.000.000,00	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			12.059.620.500,00	1.169.620.500,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin /Surat keterangan yang diterbitkan	1000	Berkas	15.000.000,00	Jumlah Ijin /Surat keterangan yang diterbitkan	1000	Berkas	15.000.000,00	Jumlah Ijin /Surat keterangan yang diterbitkan	1000	Berkas	15.000.000,00	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Unit	1	Paket	10.875.000.000,00	Jumlah Unit	1	Paket	10.875.000.000,00	Jumlah Unit	1	Paket	12.044.620.500,00	1.169.620.500,00	Anggaran digeser pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			407.225.844,00	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			407.225.844,00	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			452.225.844,00	45.000.000,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan			407.225.844,00	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan			407.225.844,00	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan			452.225.844,00	45.000.000,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang	200	Peserta	56.555.000,00	Jumlah Peserta Musrenbang	200	Peserta	56.555.000,00	Jumlah Peserta Musrenbang	200	Peserta	56.555.000,00	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Peserta MTQ	125	Peserta	350.670.844,00	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Peserta MTQ	125	Peserta	350.670.844,00	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Peserta MTQ	125	Peserta	395.670.844,00	45.000.000,00	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3	Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3	Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3	Lembaga			
	Jumlah Event	1	Event		Jumlah Event	1	Event		Jumlah Event	1	Event			
	Jumlah Lomba Desa	8	Desa		Jumlah Lomba Desa	8	Desa		Jumlah Lomba Desa	8	Desa			
	Jumlah Peserta Pemberdayaan PKK	25	Orang		Jumlah Peserta Pemberdayaan PKK	25	Orang		Jumlah Peserta Pemberdayaan PKK	25	Orang			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												20.000.000,00	20.000.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												20.000.000,00	20.000.000,00	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	
JUMLAH				18.016.116.105,00				18.016.116.105,00				19.494.236.105,00	1.478.120.000,00	

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Tahun 2022 mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Fungsi atributif dan distributif tersebut meliputi banyak sektor kegiatan. Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan dapat memerankan diri dengan pendekatan “kewilayahan”, seperti wilayah kecamatan, desa, dan dusun; dan juga dengan pendekatan “sektoral”, seperti sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, ketertiban umum, dan pemberdayaan perempuan. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah pemerintah terbelenggu pendekatan sektoral dan gagal memberdayakan camat sebagai ujung tombak kembar strategi pemerintahan sektoral maupun pendekatan kewilayahan.

Fungsi sektoral kecamatan melalui sekretariat dan 5 seksi yang ada dalam struktur organisasinya maka peran kecamatan semestinya tidak sekedar berbasis kewilayahan sebab Kecamatan sebenarnya telah menjadi perangkat daerah bukanlah perangkat wilayah. Kecamatan semestinya mengedepankan fungsi sektoral. Fungsi sektoral ini menjadikan para Kepala Seksi di Kecamatan dapat memerankan fungsinya secara optimal. Bila 5 seksi dalam organisasi Kecamatan dapat berperan aktif dan kreatif maka akan dicapai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dengan melihat posisi dan fungsi Kecamatan diatas maka Kecamatan semestinya memiliki peran dan fungsi strategis untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan keunikan melalui kombinasi pendekatan kewilayahan dan sektoral maka Kecamatan apabila didukung kebijakan, personil, anggaran dan peralatan yang memadai maka Kecamatan akan menjadi organisasi terdepan dalam mengelola masyarakat beserta sumberdaya yang ada guna percepatan pencapaian MDGs.

Masalah krusial dari belum optimalnya fungsi atributif dan delegatif adalah kebijakan anggaran yang masih memposisikan Kecamatan sebagai organisasi pelengkap bukan utama. Hal ini dari proses pengusulan anggaran sampai dengan pelaksanaannya Kecamatan mendapatkan platform anggaran yang minim dan dengan sistem penganggaran pola penyeragaman dengan kurang memperhatikan keanekaragaman dan keunikan setiap wilayah kecamatan padahal setiap wilayah kecamatan memiliki perbedaan dan keunggulan masing masing yang sudah tentu pengembangan kecamatan menggunakan pola pendekatan dan strategi yang berbeda.

Peningkatan kuantitas/jumlah pegawai kecamatan dengan menempatkan pegawai yang ada di SKPD lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai jabatan fungsional untuk ditempatkan di Kecamatan. Selama ini di SOTK Kecamatan ada jabatan fungsional namun belum pernah dimanfaatkan. Sementara itu untuk mendukung tugas dan fungsinya khususnya pelaksanaan Paten harus di dukung kelayakan teknis maka tidak pelak lagi perlunya pendistribusian tim teknis yang berkualifikasi untuk ditempatkan di kecamatan sebagai jabatan fungsional.

Peningkatan kualitas pegawai di Kecamatan. Selama ini pegawai Kecamatan jarang diikutsertakan dalam berbagai pengembangan sumberdaya manusia yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten, bahkan ada kecenderungan orang kabupaten merasa pintar dan mampu, di internal organisasi sendiri jarang dilaksanakan pengembangan SDM pegawai kecamatan. Untuk mendukung pengembangan SDM Kecamatan ke depan maka perlu diagendakan adanya pengembangan SDM Kecamatan berbasis tugas pokok dan fungsinya, sehingga para Kasi Kecamatan bisa memerankan dirinya sebagai PPTK yang handal. Sebab selama ini para Kasi Kecamatan belum secara riil dimanfaatkan dan mampu menjadi PPTK Kegiatan.

Untuk mendukung optimalisasi fungsi atributif dan delegatif adalah kebijakan anggaran yang proposial sesuai dengan beban kerja dan kondisi wilayah serta target capaian pengembangan wilayah. Untuk hal tersebut perlu dipersiapkan langkah sebagai berikut :

- a. Perencanaan anggaran : perencanaan anggaran Kecamatan semestinya berbasis tugas pokok dan fungsinya. Artinya setiap pelaksanaan fungsi organisasi harus dirancang kegiatannya secara struktur dengan pembiayaan yang memadai. Selama ini Kecamatan hanya memiliki 2 program kegiatan yaitu program administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran, semestinya ke depan perlu disusun rencana kegiatan anggaran berbasis PPTK artinya masing masing pejabat struktural memiliki rencana kerja yang nyata sesuai dengan kebutuhan yang ada yang perlu didanai. Hal ini penting sebab setelah menjadi perangkat daerah bukan kepala wilayah maka yang dikedepankan dari fungsi kecamatan bukan fungsi kewilayahan namun fungsi sektoral sesuai dengan sektor/bidang tugas masing masing pejabat struktural.
- b. Pelaksanaan anggaran : dalam pelaksanaan anggaran kecamatan diupayakan sedemikian rupa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dimana aspek visoner, transparansi, partisipasi, akuntabel, efektif dan efisien menjadi arah dari pelaksanaan kegiatan. Ini penting sebab selama ini seakan yang mengelola kegiatan hanya pengguna anggaran dan bendahara, sementara fungsi PA dan PPTK belum optimalkan secara nyata. Secara logika pekerjaan besar bila melibatkan kekuatan besar akan berhasil.
- c. Evaluasi anggaran. Yang tidak kalah penting adalah evaluasi pelaksanaan anggaran, dimana setiap anggaran belanja daerah semestinya berbasis kinerja dengan tolok ukur penilaian bukan hanya *output* namun juga

outcome bahkan samapai kepada dampak dari kegiatan. Semestinya Lakip yang saat ini digunakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintahan seakan hanya formalitas, maka kedepan Lakip diharapkan benar benar menjadi alat ukur untuk mengetahui dampak sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja SKPD ditetapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Kantor Kecamatan Loa janan adalah agar para aparaturnya dapat melaksanakan kegiatan dan fungsi pokok dalam proses penyelesaian tugas jabatan, dan petunjuk mekanisme kerja dari setiap lembaga pemerintah yang harus dilaksanakan oleh setiap aparaturnya. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan produktifitas kerja bagi aparatur pejabat struktural yang dibebankan guna memaksimalkan pencapaian program kerja sesuai spesifikasi secara berkualitas dan memuaskan.

Akhirnya kesamaan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Kecamatan Loa Janan dapat menjadi acuan pemerintah khususnya Pemerintah Kecamatan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah.